

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, masalah korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan yang dapat menyentuh berbagai macam bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam

¹ Evi Hartanti, S.H. , *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. , edisi ke 2 2007 Hlm. 1

segala hal kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, fenomena buruknya penyelenggaraan sistem hukum pidana yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang terjadinya korupsi selalu tidak lepas adanya indikasi kontroversi putusan peradilan dan hasil penanganan korupsi yang dianggap mandul. Hampir setiap media informasi cetak, elektronik, digital internet membuat tentang korupsi yang memberikan gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang jika dikaji lebih mendalam maka dapat kompleksitas dan problematik dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia dan berdampak pada sistem peradilan pidana²

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

² DR. DRS. IGM Nurdjana, SH., M.Hum. , *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta., cetakan 1 tahun 2010 hlm. 11

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.³

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan.

Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Adanya persepsi mengenai kedudukan tersangka atau terdakwa rawan menimbulkan perhatian yang sangat besar pada tersangka dan terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atau tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan.

³ Penjelasan umum Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Dalam kenyataanya, selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga perlu guna mendapatkan perhatian yaitu korban dan saksi terutama saksi pelapor. Saksi pelapor dalam kapasitasnya sebagai pemberi keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani semua pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagaimana halnya pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa. Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi pelapor juga tidak kehilangan hak-haknya, selain itu saksi pelapor juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya.

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Bisa dibayangkan bagaimana jalanya suatu persidangan tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat jalannya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu peranan saksi pelapor yang demikian ini akan sangat terasa ironis apabila kedudukan seorang saksi pelapor berada pada posisi yang lemah. Hal ini sangatlah dilematis mengingat saksi pelapor dalam posisinya sangat rentan terhadap adanya ancaman baik ancaman fisik maupun ancaman psikologis atas kesaksian yang diberikannya.

Hampir tidak adanya perlindungan terhadap kepentingan saksi pelapor, menyebabkan masyarakat takut untuk menjadi saksi sehingga mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan terselesaikan. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketakutan orang dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Tidak jarang terjadi seorang saksi pelapor malah dituduh mempunyai keterlibatan atau bahkan menjadi tersangka sebagai akibat dari keterangan yang disampaikannya. Hal demikian sering terjadi terutama dalam kasus-kasus berat seperti halnya korupsi yang melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, sehingga tidak jarang para koruptor tidak lepas dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan kemudian memberikan balasan terhadap individu yang dianggap telah merugikan dirinya, baik itu berupa ancaman yang ditujukan kepada saksi pelapor ataupun melakukan kekerasan terhadap saksi pelapor yang telah melaporkan dirinya terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, melihat dari kenyataan yang ada perlindungan terhadap saksi pelapor sangat penting kaitannya bagi penyelesaian perkara pidana. Ketersediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana korupsi sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bias dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut

maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik suatu permasalahan, yaitu:

Bentuk-bentuk perlindungan apa sajakah yang seharusnya atau sebaiknya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan apa sajakah yang seharusnya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini, penulis berharap agar tulisan ini berguna untuk :

- a. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar kiranya tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam memberikan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

⁴ Emerson Yuntho, *Khairiansyah dan Pemberantasan Korupsi*. Harian Jawa Pos, diterbitkan pada 28 November 2005. dikutip pada tanggal 30 September 2010.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil penelitian pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini melihat fakta apakah dasar hukum peraturan yang ada sudah berjalan dan diterapkan secara baik dalam perlindungan yang seharusnya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dan mengetahui peranan aparat penegak hukum terhadap perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

F. Batasan Konsep

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan studi kepustakaan.atau penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*).dan untuk penelitian ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder meliputi:

- 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Undang-undang NO. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan daam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

g) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2). Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dan juga alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung dengan nara sumber dimana penulis berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan data yang dipergunakan yang berguna dan berkaitan untuk mendukung penelitian tersebut.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Poltabes Yogyakarta

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, peraturan-peraturan yang berkaitan dan media-media cetak ataupun elektronik yang sesuai dengan permasalahan yang ditulis. Sehingga dari bahan tersebut penulis dapat menyimpulkan dan mendapatkan pemahaman mengenai obyek yang akan diteliti

4. Metode Analisis

Untuk membuktikan dan mengkaji permasalahan, maka metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Karna adanya keterkaitan antara peraturan yang mengatur serta hasil lapangan, sehingga harus ada kecocokan. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran induktif yang mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi